



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA MISKIN MELALUI KELEMBAGAAN PANGAN LOKAL

BIDANG KEGIATAN:
PKM GAGASAN TERTULIS

Diusulkan Oleh :

Ketua:	Rahmad Saleh	I34070008	2007
Anggota:	Waqif Agusta	F14070017	2007
	Dani Ratmoko	H44070014	2007
	Bagus Rudiono	I34070071	2007
	Yopy R.M. Yunus	H44080036	2008

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2011



LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : "Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumahtangga Miskin Melalui Kelembagaan Pangan Lokal"
2. Bidang Kegiatan : (-) PKM-AI (√) PKM-GT
Bidang Sosial Ekonomi
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
- a. Nama Lengkap : Rahmad Saleh
 - b. NIM : I34070008
 - c. Jurusan : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Institut Pertanian Bogor
 - e. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jl. Bukit Barisan, Gang Rukun, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara/085276202122
 - f. Alamat email : alehrp@yahoo.co.id
4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 4 (empat) orang
5. Dosen Pendamping
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Ir. Sarwititi S. Agung, MS.
 - b. NIP : 19610927 198601 2 001
 - c. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Perumahan Dosen Kampus IPB Dramaga, Bogor/085697568765

Bogor, 3 Maret 2011

Menyetujui,
Ketua Departemen
Sains Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat

Ketua Pelaksana Kegiatan

(Dr. Suryo Adi Wibowo)
NIP. 19550630 198103 1 003

(Rahmad Saleh)
NIM. I34070008

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan IPB

Dosen Pendamping

(Prof. Dr.Ir. Yonny Koesmaryono, MS)
NIP. 19581228 198503 1 003

(Dr. Ir. Sarwititi S. Agung, MS)
NIP. 19610927 198601 2 001



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah SWT Tuhan pencipta seluruh alam bahwa dengan karunia dan kasih sayang-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul “Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah tangga Miskin Melalui Kelembagaan Pangan Lokal”.

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah mengkaji dampak kemiskinan terhadap ketahanan pangan masyarakat serta menganalisis peran kelembagaan pangan dalam peningkatan ketahanan pangan. Untuk memberikan wawasan baru mengenai kelembagaan pangan lokal dalam peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ir. Sarwititi S. Agung, MS selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mendampingi dalam penulisan karya tulis ini. Juga kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan karya tulis ini. Akhirnya kepada segenap pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan karya tulis ini kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Bogor, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN.....	vi
PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Tujuan dan Manfaat	1
GAGASAN	
Karakteristik Rumah tangga serta Hubungannya dengan Ketahanan Pangan ..	2
<i>Ukuran Rumah tangga</i>	2
<i>Pendidikan</i>	2
<i>Pengeluaran Rumah tangga</i>	3
<i>Pengambilan Keputusan Rumah tangga</i>	3
Hubungan Ketahanan Pangan dengan Kemiskinan.....	4
Indikator Ketahanan Pangan	5
Tingkat dan Pola Konsumsi Pangan	5
Akses Rumah Tangga Terhadap Pangan.....	6
<i>Ketersediaan Pangan Wilayah</i>	6
<i>Kemiskinan dan Masalah Pangan dan Gizi</i>	6
<i>Manajemen Stok dan Stabilitas Harga Pangan</i>	6
Kearifan Lokal dalam Kelembagaan Pangan	7
Konsep Kelembagaan Pangan	7
Lumbung Pangan Sebagai Instrumen Ketahanan Pangan.....	7
Kondisi Kelembagaan Pangan Saat Ini	8
Solusi yang Ditawarkan	8
KESIMPULAN	9
DAFTAR PUSTAKA	10
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	11



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aspek Ketahanan Pangan dan Indikatornya	10
--	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

Ketahanan pangan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumberdaya manusia suatu negara. Kualitas sumberdaya manusia yang baik dapat dicapai apabila setiap individu dalam suatu rumah tangga mendapat asupan pangan yang cukup, aman, dan bergizi secara berkelanjutan yang akan meningkatkan status kesehatan. Berdasarkan hasil perhitungan FAO (2005), di Indonesia terdapat sekitar 6% penduduk yang menderita kelaparan yaitu sekitar 12 juta 600 ribu orang penduduk Indonesia menderita kelaparan. Berdasarkan penelitian Tanzaha (2005) di empat kabupaten yaitu Kabupaten Karawang, Garut, Pandeglang, dan Kota Bogor menunjukkan bahwa ada 9,3% rumah tangga menderita kelaparan. Diperkirakan rumah tangga yang mengalami kelaparan akan meningkat dengan berbagai sebab yang diakibatkan oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat yang akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan keluarga.

Tulisan ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, mengkaji dampak kemiskinan terhadap ketahanan pangan masyarakat, serta menganalisis peran kelembagaan pangan dalam peningkatan ketahanan pangan untuk memberikan wawasan baru mengenai kelembagaan pangan lokal dalam peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengambil keputusan terkait ketahanan pangan.

Karakteristik rumah tangga sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan dalam suatu rumah tangga, adapun karakteristik tersebut adalah: ukuran rumah tangga, pendidikan, pengeluaran rumah tangga, serta pengambilan keputusan rumah tangga.

Kemiskinan dan ketahanan pangan memiliki korelasi yang erat. Ketersediaan pangan yang memadai mengandung arti bahwa secara rata-rata, pangan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Namun, akses yang lemah terhadap informasi pangan lokal menjadikan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kelaparan karena ketidakadaan sumberdaya untuk memproduksi pangan atau ketidakmampuan untuk membeli pangan sesuai kebutuhan. Berbagai faktor masalah pangan dan gizi disebabkan oleh kemiskinan yang dinilai memiliki peranan penting dan bersifat timbal balik. Timbal balik artinya kemiskinan akan menyebabkan kurang gizi dan individu yang kurang gizi akan berakibat atau melahirkan kemiskinan.

Kelembagaan pangan masyarakat merupakan sebuah wadah yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Lumbung pangan masyarakat erat kaitannya dengan dua aspek yaitu (1) potensi sektor pertanian; dan (2) peran kelembagaan pangan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Kelembagaan pangan berperan dalam stabilitas stok pangan dalam memenuhi kebutuhan. Pada saat terjadi paceklik, maka peran kelembagaan pangan sangat diperlukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan. Kelembagaan pangan juga mengatur mulai dari proses produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan agar adil dan merata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan pangan adalah hak asasi setiap individu yang wajib dipenuhi oleh suatu negara. Kebutuhan pangan menjadi semakin penting manakala pangan tidak hanya kebutuhan dasar melainkan hak dasar bagi setiap manusia. Ketahanan pangan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumberdaya manusia suatu negara. Kualitas sumberdaya manusia yang baik dapat dicapai apabila setiap individu dalam suatu rumah tangga mendapat asupan pangan yang cukup, aman, dan bergizi secara berkelanjutan yang akan meningkatkan status kesehatan.

Indonesia memiliki penduduk 230 juta jiwa dengan beraneka ragam budaya, sosio-ekonomi, dan letak geografis menduduki peringkat 107 dari 177 negara dalam indeks pembangunan manusia. Meskipun Indonesia mengalami pemulihan yang cukup berarti sejak krisis ekonomi tahun 1998, namun masalah kemiskinan, kerawanan, dan gizi masih cukup besar dan beragam antar provinsi dan kabupaten.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya sumberdaya alam sebagai pendukung pertanian. Namun, negara ini juga tidak bebas dari persoalan krisis pangan. Masalah ketahanan pangan baik ditingkat nasional, daerah, maupun rumah tangga merupakan masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Masalah yang dihadapi bersifat multidimensional yaitu pada sub-sistem produksi, sub-sistem distribusi, dan sub-sistem konsumsi.

Berdasarkan hasil perhitungan FAO (2005), di Indonesia terdapat sekitar 6% penduduk yang menderita kelaparan yaitu sekitar 12 juta 600 ribu orang penduduk Indonesia menderita kelaparan. Berdasarkan penelitian Tanzaha (2005) di empat kabupaten yaitu Kabupaten Karawang, Garut, Pandeglang, dan Kota Bogor menunjukkan bahwa ada 9,3% rumahtangga menderita kelaparan. Diperkirakan rumah tangga yang mengalami kelaparan akan meningkat dengan berbagai sebab yang diakibatkan oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat yang akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan keluarga.

Upaya pemberdayaan dan peningkatan ketahanan pangan rumahtangga miskin membutuhkan adanya sebuah kelembagaan. Melalui wadah kelembagaan itulah setiap pihak berkepentingan dapat bersama-sama mengkaji masalah-masalah yang dihadapi dan sekaligus mencari jalan keluarnya. Sebenarnya sudah sejak lama masyarakat pedesaan memiliki kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai wadah dalam menyelesaikan beragam permasalahan hidup secara mandiri. Namun, kelembagaan lokal tersebut menjadi melemah karena tergerus oleh pendekatan pembangunan yang terpusat. Ketika kelembagaan lokal melemah, maka hal itu akan berdampak terhadap masalah hidup yang dihadapinya.

Tujuan dan Manfaat

Penulisan karya tulis ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan.

2. Mengkaji dampak kemiskinan terhadap ketahanan pangan masyarakat.
3. Menganalisis peran kelembagaan pangan dalam peningkatan ketahanan pangan.

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan baru mengenai kelembagaan pangan lokal dalam peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat.
2. Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengambil keputusan terkait ketahanan pangan.

GAGASAN

Karakteristik Rumahtangga serta Hubungannya dengan Ketahanan Pangan

Ukuran Rumahtangga

Menurut Martianto & Ariani (2004) dalam Herdiana (2009), ukuran rumahtangga mempengaruhi pendapatan per kapita dan pengeluaran konsumsi pangan. Rumah tangga dengan banyak anak dan jarak kelahiran antar anak yang sangat dekat akan menimbulkan lebih banyak masalah. Pangan yang tersedia untuk satu keluarga, mungkin tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumahtangga tersebut tetapi hanya mencukupi sebagai dari anggota keluarga itu.

Berdasarkan penelitian Prabawa (1998) dalam Herdiana (2009) diungkapkan bahwa setinggi apapun tingkat pendapatan yang diperoleh seorang kepala rumahtangga dalam rumahtangganya, pada akhirnya kesejahteraan mereka ditentukan oleh pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan perkapita selain ditentukan oleh total pendapatan yang diterima, juga oleh seluruh anggota rumahtangga yang bersangkutan. Tidak semua anggota rumahtangga dalam keluarga bekerja produktif sehingga dapat memperbesar beban ketergantungan. Banyaknya jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita dan besarnya konsumsi keluarga. Selain itu, Hartog, Staveren, dan Brower (1995) juga menyatakan bahwa sebagian besar rumahtangga akan mempengaruhi kebiasaan makan, khususnya pada rumahtangga miskin yang bergantung pada pendapatan tunai untuk membeli bahan pangan. Oleh karena itu, jumlah anggota keluarga atau ukuran rumahtangga akan memberi dorongan bagi rumahtangga bersangkutan untuk lebih banyak menggali sumber pendapatan lainnya.

Pendidikan

Hasil penelitian Megawangi (1994) dalam Herdiana (2009) membuktikan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan suami berhubungan nyata dan positif terhadap kebiasaan merencanakan anggaran biaya. Dengan demikian, rumahtangga yang dikepalai oleh seseorang dengan tingkat pendidikan

rendah cenderung lebih miskin dibandingkan dengan rumahtangga yang dikepalai oleh mereka yang berpendidikan tinggi.

Pengeluaran Rumahtangga

Pengeluaran rumahtangga dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran pangan dan pengeluaran nonpangan. Kartika (2005) dalam Herdiana (2009) mendefinisikan pengeluaran pangan adalah jumlah uang yang akan dibelanjakan untuk konsumsi pangan, sedangkan pengeluaran nonpangan adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk keperluan selain pangan seperti pendidikan, listrik, air, konsumsi, transportasi, tabungan, biaya produksi pertanian dan kebutuhan nonpangan lainnya.

Menurut Tanziha (2005) bahwa secara naluri individu, seseorang akan terlebih dahulu memanfaatkan setiap penghasilan bagi kebutuhan dasarnya berupa pangan. Jika kebutuhan dasarnya tersebut telah terpenuhi, maka tiap kelebihan penghasilannya dialokasikan untuk nonpangan. Proporsi pengeluaran pangan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan rumahtangga semakin rendah.

Pengambilan Keputusan Rumahtangga

Menurut Guhardja (1992) dalam Herdiana (2009) pengambilan keputusan merupakan suatu proses menetapkan suatu keputusan yang terbaik, logis, rasional, dan ideal, berdasarkan fakta, data, dan informasi dari sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan resiko terkecil, efektif, dan efisien, yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Menurut Sajogyo (1983) dalam Herdiana (2009) menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan satu-satunya sumberdaya pribadi yang paling berpengaruh terhadap kekuasaan. Dikatakan bahwa istri yang mengenyam pendidikan formal lebih rendah dari suami, tetapi mempunyai pengalaman yang memperkaya pribadinya, mempunyai kekuasaan yang setara dengan suami, dan bila perlu istri tersebut mampu mengambil keputusan tertentu. Melalui pengalaman (terutama yang diperoleh istri di luar rumah) istri akan berinteraksi dengan nilai-nilai baru yang pada akhirnya akan menambah pengetahuannya. Istri yang pendidikannya rendah dan tidak mempunyai sumberdaya pribadi lain (selain pendidikan) maka kekuasaan dalam rumahtangga biasanya akan didominasi oleh suaminya.

Menurut Sajogyo (1983) dalam Herdiana (2009), tingkat keputusan dihubungkan dengan pengeluaran pokok terdiri dari: (1) makanan (biaya hidup, jenis atau menu makanan, distribusi), (2) perumahan (pembelian dan perbaikan), pakaian, pendidikan, kesehatan, dan perabotan rumahtangga. Sedangkan untuk jenis keputusan rumahtangga, dikelompokkan dalam lima tingkatan yaitu: (1) keputusan dibuat oleh istri tanpa melibatkan suami, (2) keputusan dibuat bersama oleh suami-istri, tetapi dengan pengaruh lebih besar dari istri, (3) keputusan dibuat bersama dan senilai oleh suami-istri, (4) keputusan dibuat bersama suami-istri

tetapi dengan pengaruh yang lebih besar dari suami, (5) keputusan dibuat oleh suami seorang diri tanpa melibatkan istri.

Hubungan Ketahanan Pangan dengan Kemiskinan

Menurut FAO (1997) ketahanan pangan merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan dimana rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Hal tersebut berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan yang memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama. Ketersediaan pangan yang memadai mengandung arti bahwa secara rata-rata, pangan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Stabilitas merujuk pada kemungkinan bahwa pada situasi yang sesulit apapun, konsumsi pangan tidak akan jatuh di bawah kebutuhan gizi yang dianjurkan. Sedangkan akses mengacu pada fakta bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kelaparan karena ketidakadaan sumberdaya untuk memproduksi pangan atau ketidakmampuan untuk membeli pangan sesuai kebutuhan. Determinan utama dari ketahanan pangan adalah daya beli atau pendapatan untuk memenuhi biaya hidup (Tabor *et al*, 2000).

Menurut UU Pangan 1996, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga, tidak hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi juga harus aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Secara umum terdapat empat aspek ketahanan pangan utama yaitu: aspek ketersediaan pangan, aspek stabilitas pangan, aspek keterjangkauan, dan aspek konsumsi (Purwiyatno, 2009).

Rumah tangga miskin dapat diidentifikasi dengan penerapan ukuran insiden kemiskinan pada tingkat individu. Dalam pengukuran diperlukan beberapa penyesuaian karena garis kemiskinan berbeda-beda menurut ukuran dan tipe rumah tangga. Angka indeks yang berhubungan dengan garis kemiskinan untuk tipe rumah tangga yang berbeda dikenal dengan skala kesetaraan. Skala ini digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan menurut rumah tangga berdasarkan karakteristik rumah tangga yang diamati. Terdapat tiga pendekatan utama dalam menentukan skala persamaan untuk tipe rumah tangga yang berbeda: (i) survei kebutuhan individu; (ii) penelitian empirik mengenai kebiasaan pengeluaran rumah tangga; (iii) studi tentang gizi dan psikologi (Raharto dan Romdiati, 2000).

Ukuran rumah tangga miskin lainnya yang dikembangkan oleh Sayogyo. Penentuan garis kemiskinan menurut konsep sayogyo untuk kota adalah berdasarkan rata-rata kebutuhan kalori dan protein untuk orang Indonesia berdasarkan saran dari WHO yaitu 1.900 kalori dan 40 g protein per kapita per hari. Menurut garis kemiskinan Sayogyo:

1. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga dengan pengeluaran setara beras kurang dari 320 kg per kapita per tahun.
2. Rumah tangga sangat miskin adalah rumah tangga dengan pengeluaran setara beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun.

Indikator Ketahanan Pangan

Menurut Purwiyatno (2009), terdapat empat aspek ketahanan pangan yang utama yaitu: (i) aspek ketersediaan pangan; (ii) aspek stabilitas pasokan; (iii) aspek keterjangkauan; (iv) aspek konsumsi. Secara lebih detail, keempat aspek ketahanan pangan yang saling terkait ini dapat dijelaskan pada table 1.

Tabel 1. Aspek Ketahanan Pangan dan Indikatornya

Aspek Ketahanan Pangan	Indikator	Indikator Akhir
Ketersediaan Pangan	Kecukupan jumlah Kecukupan mutu Kecukupan gizi Keamanan	Kehidupan individu yang aktif dan sehat
Keterandalan Persediaan	Stabilitas pasokan pangan pada setiap waktu Stabilitas pasokan pangan pada setiap waktu	
Keterjangkauan	Keterjangkauan fisik, ekonomi, dan social Kesesuaian dengan preferensi Kesesuaian dengan kebiasaan dan budaya Kesesuaian dengan kepercayaan	
Kecukupan Konsumsi	Kecukupan asupan Kualitas pengelolaan pangan Kualitas sanitasi dan hygiene Kualitas air Kualitas pengasuhan anak	

Tingkat dan Pola Konsumsi Pangan

Persyaratan kecukupan keberlanjutan konsumsi pangan dapat tercapai adalah adanya aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan. Aksesibilitas ini tercermin dari jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Konsumsi pangan secara riil dapat ditunjukkan oleh kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan dan menggambarkan tingkat kecukupan pangan dalam rumah tangga. Perkembangan tingkat konsumsi pangan tersebut secara implisit juga direfleksikan melalui tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat terhadap pangan.

Akses Rumah Tangga Terhadap Pangan

Ketersediaan Pangan Wilayah

Beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, produksi beras menjadi indikator yang sangat penting untuk diperhatikan pencapaiannya. Selama periode 2001-2005 ketersediaan padi yang berasal dari produksi dalam negeri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,8 persen per tahun, yaitu meningkat dari 50,46 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2001 menjadi 15,54 juta ton pada tahun 2005 (Bapenas, 2007). Namun, ketersediaan pangan secara makro tidak mencerminkan ketersediaan pangan secara mikro.

Kemiskinan dan Masalah Pangan dan Gizi

Berbagai faktor masalah pangan dan gizi disebabkan oleh kemiskinan yang dinilai memiliki peranan penting dan bersifat timbal balik. Timbal balik artinya kemiskinan akan menyebabkan kurang gizi dan individu yang kurang gizi akan berakibat atau melahirkan kemiskinan. Masalah kurang gizi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pemiskinan melalui tiga cara. Pertama, kurang gizi secara langsung menyebabkan hilangnya produktivitas karena kelemahan fisik. Kedua, kurang gizi secara tidak langsung menurunkan kemampuan fungsi kognitif dan berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan. Ketiga, kurang gizi dapat menurunkan tingkat ekonomi keluarga karena meningkatnya pengeluaran untuk berobat (Bapenas, 2007).

Tingkat dan kualitas konsumsi makanan anggota rumah tangga miskin tidak memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhan. Dengan asupan makanan yang tidak tercukupi bagi anggota rumah tangga menjadi lebih rentan terhadap infeksi sehingga sering menderita sakit. Keluarga miskin dicerminkan oleh profesi/mata pencaharian yang biasanya adalah buruh/pekerja kasar yang berpendidikan rendah sehingga tingkat pengetahuan pangan dan pola asuh keluarga juga kurang berkualitas. Keluarga miskin juga ditandai dengan tingkat kehamilan tinggi karena kurangnya pengetahuan tentang keluarga berencana dan adanya anggapan bahwa anak dapat menjadi tenaga kerja yang memberi tambahan pendapatan keluarga. Namun demikian, banyaknya anak justru mengakibatkan besarnya beban anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga miskin.

Manajemen Stok dan Stabilisasi Harga Pangan

Manajemen stok pangan dan stabilitasi harga pangan yang bersifat strategis menjadi sangat krusial bagi perkembangan ekonomi pangan dan ketahanan pangan. Pangan strategi seperti beras sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi energi masyarakat karena beras sebagai makanan pokok masyarakat. Kenaikan harga pangan strategis di pasar domestik cukup bervariasi. Kenaikan harga pangan diakibatkan oleh inflasi. Harga pangan yang berfluktuatif dapat diantisipasi dengan sistem manajemen stok seperti adanya lumbung padi

desa. Adanya lumbung padi tersebut diharapkan dapat menstabilkan stok dan harga bahan pangan.

Kearifan Lokal dalam Kelembagaan Pangan

Ketahanan pangan di tingkat rumahtangga dapat dipenuhi dari produksi dan cadangan pangan sendiri maupun kelompok. Menurut Kantor (2001) dalam Koesoemowardani (2003) menjelaskan konsep ketahanan pangan komunitas sebagai sebuah konsep yang berorientasi pencegahan yang mendukung pengembangan dan penyediaan pangan yang berkelanjutan dengan strategi berdasarkan komunitas untuk meningkatkan akses rumahtangga miskin terhadap penyediaan pangan.

Konsep Kelembagaan Pangan

Kelembagaan dalam masyarakat merupakan nilai dan norma yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk kelembagaan masyarakat dalam pengembangan dan penyediaan pangan bagi masyarakat melalui kelembagaan pangan. Menurut Departemen Pertanian (2000) kelembagaan pangan merupakan organisasi yang tumbuh dari dan oleh masyarakat sendiri yang didasari kesamaan kepentingan dalam menangani bidang pangan secara formal terorganisasi dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga tertulis.

Berdasarkan kajian Tim Studi Lumbung IPB (1983) dalam Koesoemowardani (2003) sistem lumbung desa yaitu suatu sistem kelembagaan penyediaan bahan pangan (beras dan non beras) dan bahan-bahan lainnya, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan, terutama dalam menanggulangi kerawanan pangan dan gizi yang ditimbulkan oleh kemiskinan structural. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan lumbung desa diharapkan didukung oleh peran serta aktif dari masyarakat desa itu sendiri, dengan bantuan pemerintah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi setempat. Sesuai dengan tujuan peningkatan kesejahteraan, sistem lumbung desa ini dapat berperan sebagai ujung mata rantai dan juga wadah lokal bagi program-program bantuan sosial pemerintah, padat karya, intensifikasi usahatani, dan PKK.

Lumbung Pangan Sebagai Instrumen Ketahanan Pangan

Menurut Kusumowardani (2002) istilah lumbung telah dikenal oleh masyarakat di beberapa daerah. Lumbung yang ada sering dikonotasikan sebagai lumbung paceklik. Lumbung paceklik tersebut dibentuk sebagai cadangan bagi petani di musim paceklik sehingga petani dapat meminjam gabah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Keberadaan lumbung pangan merupakan lembaga alternatif yang diupayakan dapat menggantikan peran kelembagaan lokal yang sekarang mengalami banyak kehancuran. Keberadaan lumbung pangan tidak hanya diperlukan pada masa paceklik saja melainkan sebagai alternatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

penyediaan modal bagi petani. Peran yang dijalankan oleh lumbung pangan adalah sebagai berikut:

1. Menampung surplus produksi pangan pedesaan pada saat panen.
2. Melayani kebutuhan pangan pedesaan pada musim paceklik.
3. Melakukan simulasi pemupukan modal melalui iuran dalam bentuk bahan pangan maupun tunai.
4. Membantu petani yang kesulitan modal usaha dengan cara menyediakan alternative kredit mikro bagi warga komunitas sehingga warga terhindar dari praktek-praktek bank harian dari para pengijon.
5. Menghindari petani dari kerugian penjualan dini atas produksi usaha tani untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan menghindarkan petani untuk membeli bahan panga pokok dengan harga tinggi pada musim paceklik.

Kondisi Kelembagaan Pangan Saat Ini

Kondisi kelembagaan pangan saat ini tidak menjadikan lumbung padi sebagai lembaga yang dapat menjamin ketahanan pangan. Masyarakat sekarang lebih percaya terhadap kelembagaan seperti Bulog yang lebih dianggap modern, dan diharapkan mampu menggantikan fungsi lumbung desa. Kenyataannya hasil yang diharapkan berbeda, pada saat krisis terjadi Bulog tidak dapat menjalankan perannya sebagai badan yang dapat mengatasi masalah pangan. Bulog tidak dapat menjamin perputaran beras “dari desa ke desa” secara lancar.

Berlakunya harga dasar gabah dimaksudkan agar pemasaran hasil padi para petani terjamin, terutama pada hasil panen berlimpah, tanpa mengalami penurunan harga yang parah. Namun, dalam praktiknya petani sering terbentur pada ketentuan teknis dari Bulog (standar kualitas, standar toleransi, dan lain-lain yang menjadi ketentuan). Akibatnya, jaminan pemasaran tak dapat dipenuhi dan harga mengalami kejatuhan yang merugikan.

Solusi yang Ditawarkan

Adanya faktor kemiskinan tentu akan berdampak signifikan pada ketahanan pangan pada rumah tangga yang memiliki *multiplier effect* terhadap status gizi dan kerawanan pangan. Perubahan terhadap produksi pangan akan berdampak pada ketersediaan dan stabilitas pangan yang akan berdampak pula terhadap ketahanan pangan di daerah tersebut.

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat merupakan sebuah wadah yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga. Lumbung pangan masyarakat erat kaitannya dengan dua aspek yaitu (1) potensi sektor pertanian; dan (2) peran kelembagaan pangan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ketahanan pangan bagi masyarakat adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Agar anggota masyarakat mendapat pangan yang cukup untuk dikonsumsi maka ketersediaan pangan juga harus dipenuhi. Oleh karena itu, untuk memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

kecukupan pangan tersebut masyarakat harus memiliki akses terhadap pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Akses secara fisik dapat dijelaskan dengan ketersediaan pangan di suatu daerah yang dapat menjamin kebutuhan pangan individu di daerah tersebut sedangkan akses secara ekonomi dapat dijelaskan dengan daya beli masing-masing rumah tangga untuk mendapatkan pangan tersebut. Menurut Kinseng (2009) preferensi masyarakat terhadap pangan juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan lingkungan budaya setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi ketahanan pangan di daerah tersebut.

Pada kenyataannya banyak ditemukan kelembagaan pangan yang tidak memiliki kemampuan untuk berkembang sehingga tidak memiliki kemampuan untuk berkembang. Kelemahan kemampuan kelembagaan diindikasikan akibat adanya kelemahan kultur yang ada di masyarakat serta kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tata kelola dan aturan kelembagaan yang dibuat.

Menghidupkan kembali lumbung pangan merupakan cara yang tepat untuk membangun ketahanan pangan. Lumbung pangan memiliki fungsi bukan hanya sebagai tempat penyimpanan pangan, yakni juga sebagai bentuk kelembagaan yang menjamin hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana ketercukupan individu terhadap pangan yang bergizi dan berimbang. Ketahanan pangan sangat terkait dengan kemampuan menyediakan pangan ketika pangan tersebut dibutuhkan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ketahanan pangan, yakni ukuran rumahtangga, tingkat pendidikan, pengambilan keputusan konsumsi, dan pengeluaran rumahtangga untuk konsumsi pangan.

Berbagai masalah pangan dapat disebabkan oleh kemiskinan yang memiliki peranan penting dan bersifat timbal-balik terhadap kondisi ketahanan pangan. Keluarga miskin mencerminkan pendapatan dan pendidikan rendah sehingga tingkat pengetahuan pangan dan pola asuh keluarga juga kurang berkualitas. Keluarga miskin juga ditandai dengan tingkat kehamilan tinggi karena kurangnya pengetahuan tentang keluarga berencana dan adanya anggapan bahwa anak dapat menjadi tenaga kerja yang memberi tambahan pendapatan keluarga. Namun demikian, banyaknya anak justru mengakibatkan besarnya beban anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga miskin.

Kelembagaan pangan berperan dalam stabilitas stok pangan dalam memenuhi kebutuhan. Pada saat terjadi paceklik, maka peran kelembagaan pangan sangat diperlukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan. kelembagaan pangan juga mengatur mulai dari proses produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan agar adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiana E. 2009. *Analisis Jalur Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah tangga di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. [skripsi]. Bogor : Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Hariyadi, P. 2009. *Menuju Kemandirian Pangan Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*. Prosiding seminar: Menuju Ketahanan Pangan yang Kokoh sebagai *Buffer* Krisis dan Fondasi Ketahanan Nasional. Bogor: SEAFast Center.
- Koesoemowardani, N. 2003. *Peran Komunikasi dalam Pengembangan Lumbung untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kasus Lumbung Pangan di Ciamis Jawa Barat*. [tesis]. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Kusumowardani, N. 2002. *Pendampingan Lumbung Pangan untuk Pemberdayaan Petani*. Dalam Bunga Rampai Pemikiran Buletin PSP-IPB. Bogor: PSP IPB.
- Martianto D, M Ariani. 2004. *Analisis Konsumsi Pangan Rumah tangga*. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. Jakarta: Lembaga Pengetahuan Indonesia.
- Tabor, S., Soekirman, dan D. Martianto. 2000. *Keterkaitan antara Krisis Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Perbaikan Gizi*. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Tanziha, I. 2005. *Analisis Peubah Konsumsi Pangan dan Sosial Ekonomi Rumah tangga untuk Menentukan Determinan dan Indikator Kelaparan*. [disertasi]. Bogor: Program Doktor, Institut Pertanian Bogor.
- Sajogyo P. 1983. *Peran Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tim Studi Lumbung IPB. 1983. *Sistem Lumbung Desa Sebagai Alat Pemantapan Kecukupan Pangan dan Kebijakan Pemerataan Pembangunan di Indonesia*. (tidak dipublikasikan)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Ketua Kelompok

Nama Lengkap : Rahmad Saleh

NIM : I34070008

Tempat dan Tanggal Lahir : Panyabungan, 26 Nopember 1988

Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat

-

2. Anggota Kelompok

Nama Lengkap : Waqif Agusta

NIM : F14070017

Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 5 Agustus 1989

Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat

-

3. Anggota Kelompok

Nama Lengkap : Dani Ratmoko

NIM : H44070014

Tempat dan Tanggal Lahir : Kebumen, 22 Agustus 1989

Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat

-

4. Anggota Kelompok

Nama Lengkap : Bagus Rudiono

NIM : I34070071

Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes, 27 Maret 1989

Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat

-

5. Anggota Kelompok

Nama Lengkap : Yopy R. M. Yunus

NIM : H44080036

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 2 April 1990

Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat